

**Masukan dan Saran**  
**Terkait Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2022**

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan Permasalahan	Alternatif Solusi Permasalahan
6/2/2022 14:09:25	Anindya Putri	Set PPMU Jateng	Penyelarasan dengan dokumen2 di bawahnya dan penentuan batas wilayah yg	Melakukan desk dengan OPD maupun survey secara langsung untuk
6/2/2022 14:21:54	MOH NUR AZIZ	DPUTARU KAB. REMBANG	Kebijakan terkait LP2B dan LSD dapat untuk disinkronkan di tingkat Provinsi dengan Kemen ATR/BPN serta Kementan sehingga daerah tinggal mengikuti arahan terkait luasan dan spasialnya	Rapat Koordinasi, Kab/Kota dengan pemerintah Provinsi dan Kemen ATR/BPN serta Kementan terkait LSD/LP2B
6/2/2022 14:28:39	Desa. R. Ahmad Surya Subagya	Dinas ESDM provinsi Jawa Tengah	Potensi mineral tambang tidak sama di setiap tempat, karena potensi tersebut bersifat insitu maka tidak semua kabupaten mempunyai potensi yg sama. Kebutuhan bahan konstruksi setiap tahun terus bertambah, sehingga pemanfaatan bahan tambang semakin meningkat. Kegiatan pertambangan bersifat pinjam lahan, sehingga setelah selesai melakukan penambangan, penggunaan tanahnya dikembalikan sesuai tata	Didalam rencana tata ruang dibuat prosedur pinjam lahan selain pertambangan untuk digunakan pertambangan, ditentukan prosedurnya, syarat syarat nya dan konsekuensi jika dilanggar
6/2/2022 15:24:27	Bawono	Warga Pesisir Jawa Tengah	Land Subsidence merupakan isu yang sedang hangat diperbincangkan dan melanda sebagian pesisir Provinsi Jawa Tengah. Mau tidak mau, suka tidak suka, fenomena alam ini merenggut luasan wilayah darat di pesisir Jawa Tengah. Intensitas dan laju transgresional tersebut tampak tenang, namun sangat berdampak bagi masyarakat. Konteks hazard (bahaya) lambat laun menjadi bencana (disaster) jika dibiarkan.	Melihat proyeksi dan berbagai kajian yang berkenaan dengan pesisir Provinsi Jawa Tengah terdampak land subsidence dan/atau rob, RTRWP Jawa Tengah perlu mengantisipasi konteks landaan genangan (inundasi) dari berbagai kajian maupun proyeksi potensi tersebut. Luapan dan genangan akibat dari banjir rob pesisir utara semakin mengarah ke selatan (daratan). Pernah suatu ketika ada proyeksi peta rilis dari Kementerian PU beserta stakeholder terkait sekira tahun 2013, genangan tersebut sekitar 2-3 Km dari bibir pantai yang diperkirakan akan menjangkau ketika tahun 2050 (dalam kondisi stagnan tanpa ada akselerator perubahan pemukiman/ aktivitas industri dari manusia) di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Saat ini, 2022, lokus tersebut telah dijangkau, walaupun semi-permanen genangannya, artinya kajian tersebut "close on".  RTRWP Jawa Tengah perlu, - Deliniasi pesisir utara yang serius - menzonasi kawasan rawan bencana rob - permukiman idealnya berada menjauh dari kawasan pesisir (jika masih memungkinkan) - RTRWP Jawa Tengah "sing sembodo", artinya tidak sering gonta-ganti karena faktor kelupaan narik deliniasi yang kurang/ salah perhitungan. Buatlah satu saja, namun impactnya paripurna. - Udah itu aja.
6/2/2022 16:05:08	Agus salim	Dinas Perkim & LH	Banyak program yang berbenturan dengan pola ruang yang ada baik LP2B ,LCP2B &LSD sehingga banyak kegiatan / program yang harusnya bisa di laksanakan sehingga harus di alihkan juga bermasalah dan aturan tsh	Belum ada solusi mohon kajian lebih lanjut untuk permasalahan di kab temanggung
6/2/2022 16:09:08	Tri Setyo Wibowo	BAPPEDA Kota Tegal	Perlu dikaji lagi tentang amanat yang ada di RTRW provinsi untuk Kota Tegal antara lain tentang luasan KP2B, Rencana Terminal Tipe B, Pelabuhan Pengumpan lokal, Depo Pertamina dan kejelasan rencana kereta api cepat	KP2B perlu dikaji lagi luasan yang dapat dipertahankan sebagai LSD. Cukup pengembangan terminal tipe A, revitalisasi Pelabuhan Niaga dan PPP Tegalsari menjadi PPN. Kepastian optimalisasi ex Depo Pertamina, dan
6/2/2022 17:08:54	Henri Cahyo Widiyanto	BPN kota Tegal	Adanya 2 peruntukan dalam sebidang tanah	Deliniasi zona/kawasan dengan memperhatikan peta pendaftaran tanah dari BPN kota Tegal sehingga tidak terjadi lagi sebidang tanah dengan 2 peruntukan

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan Permasalahan	Alternatif Solusi Permasalahan
6/2/2022 19:23:44	Khaerudin	DPUPR Kota Pekalongan	1. Jalan Pantura yg melewati Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kab. Batang msh sering terjadi kemacetan Krn volume kendaraan yg besar 2. Pembangunan Kawasan Industri terpadu Batang perlu diimbangi dg penyediaan Sarana Prasarana Penunjang	1. Perlunya memprioritaskan terwujudnya Jalur Lingkar Petanglong utk mengurangi kemacetan di Kawasan Perkotaan Petanglong 2. Menetapkan kawasan sekitar KITB sbg Kawasan Penyangga, termasuk Kota Pekalongan sbg Kawasan Perdagangan Jasa skala Kawasan
6/2/2022 20:34:18	Iman Senoadji Firmansyah ST MEpa	DPUPR Kota Tegal	Adanya LSD dari kementerian ATR BPN	Tidak perlu menambahkan kategori baru diluar RTRWN RTRW PROVINSI dan RTRW kota
6/2/2022 21:40:15	Budi Cahyono	Perwakilan Petani & Pemilik Sawah di Prawean, Bandengan, Jepara	1. Adanya Perubahan pemanfaatan lahan pertanian / sawah sehingga beberapa lahan lainnya terdampak (banjir) & sudah sejak Desember 2020 tidak bisa ditanami 2. Masalah ini sudah dilaporkan ke Bupati & Gubernur, sudah ada surat balasan dari Sekda Prop Jateng No. 600/0003868 Tanggal 8 Maret 2021 dan sudah ada upaya pembuatan Darinase oleh pelaku pengurukan namun sampai hari ini masih tergenang (tidak bisa ditanami) 3. Permasalahan RTRW : - Hilangnya Lambiran Pantai (Contoh Sebagian Pantai di desa Bandengan sudah dikuasai Hotel maupun Resort) - Hilangnya rawa-rawa (Berubah jadi Hotel / Resort & Perumahan) sebagai penampung sementara air hujan, sehingga banjir merusak tanaman persawahan.	Masukan tuk Permasalahan sawah : 1. Memastikan saluran Darinase yang dibangun bisa bermanfaat untuk membuang / mengalirkan banjir sehingga tidak merusak sawah.  Masukan tuk RTRW : - Tentang batas Lambiran (yang harus bebas dari bangunan) terutama Pantai & Sungai. - Perlindungan Lahan Pertanian (Sawah & Lahan Produktif) untuk ketahanan pangan nasional. - Perumahan / Pabrik diarahkan ke Daerah / tanah non Produktif (menjaga ketahanan pangan & mengurangi lahan kritis)  Kami sangat mendukung pembangunan karena bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun akan lebih elok jika diminimalisir Dampak Negatif & dimaksimalkan Dampak Positifnya.
6/3/2022 0:14:50	Rudy Suliantoro	Swasta	Pembangunan	Rt rw
6/3/2022 6:09:44	Dwi Sampurno Priyadi	Kantor Pertanahan Kab Pematang	Dalam proses pengurusan RTR baik propinsi ataupun kab/kota, setidaknya wajib menggariskan ranah kebijakan yang tegas terkait hasil produk hukum berupa Perda tentang RTRW yang tidak bertumpang dengan kebijakan lain, misal LSD yang mengganggu dalam proses bisnis investasi, peningkatan PAD, penyerapan tenaga kerja, Kebutuhan Rumah Tinggal dalam suatu daerah yg padat penduduk dan berkembang.	segera selesaikan kejelasan terkait kebijakan LSD, Kepmen 1589/2021 agar produk hukum berupa Perda daerah tentang RTRW yg luas terpublikasi lebih dapat dipedomani, membantu masyarakat dan pemerintah dalam ranah pengembangan wilayah.
6/3/2022 7:05:36	wisnu suryotomo	swasta (tukang poto keliling)	1. Permasalahan pemanfaatan lahan untuk kegiatan penambangan sirtu (pasir dan batu) atau kebanyakan orang menyebul Galian GOL C 2. Permasalahan alih fungsi lahan di daerah Kawasan Tinggi Dieng	1. Permasalahan pemanfaatan lahan untuk kegiatan penambangan sirtu (pasir dan batu) atau kebanyakan orang menyebul Galian GOL C Pihak ESDM Propinsi Jawa Tengah bisa bersimbiosis dengan beberapa temen temen planer untuk merancang kajian peruntukan lahan untuk kawasan pertambangan Setidaknya dalam kajian pertambangan tersebut ditekankan terkait regulasi dan sanksi bagi pelaku usaha yang "NGEWENG" alias bandel yang tidak memperhatikan aspek teknis, lingkungan hidup, sosial ekonomi dan budaya, yang hanya mengejar Rate keuntungan, tidak sedikit pertambangan di Jawa Tengah yang masih samar legalitasnya. adi dalam kajian pertambangan tersebut memuat identifikasi jenis material tambang, tereka berapa volume material tambang dan terukut berapa yang diizinkan untuk ditambang. serta di dalam kajian pertambangan tersebut memberikan rekomendasi teknis terkait tata cara penambangan baik yang dilakukan dengan menggunakan alat berat atau manual. 2. Permasalahan alih fungsi lahan di daerah Kawasan tinggi dieng sebagai dataran tinggi yang berfungsi sebagai kawasan hutan (daerah hulu) yang sekarang banyak berubah menjadi lahan pertanian semusim (tanaman kentang dan kobis), apakah tidak memiliki resiko lingkungan bagi daerah yang ada di bawahnya (daerah hilir)

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan Permasalahan	Alternatif Solusi Permasalahan
6/3/2022 7:05:43	Prof. Dr. Juhadi, M.Sc	Geografi UNNES Semarang	RTRW yang telah disepakati perlu dikemas dalam sistem teknologi yang dapat dipantau/monitoring, dievaluasi secara real time dan berkelanjutan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan	Teknologi WEBGIS-Kunmap memiliki kemampuan untuk menampilkan Produk RTRW secara real time dan berkelanjutan, shg memudahkan para pengambil keputusan untuk dasar pembangunan wilayah. Teknologi WEBGIS-Kunmap merupakan produk anak bangsa sendiri, yang tidak tergantung pada asing. Semua data tersimpan dalam server sendiri dan dapat diakses dengan perangkat komputer relatif sederhana maupun smartphone. WEBGIS-Kunmap telah dikembangkan oleh CGISs (Central for Geospatial Information Services)-Universitas Negeri Semarang.
6/3/2022 7:26:16	Hariyanto	Geografi UNNES	Mohon dalam memberi ijin kegiatan/ pembangunan yg berskala nasional/ regional disesuaikan dgn klas jalan. Sebagai contoh kegiatan wisata religi Fatimah Azahra yg berada di Kal. Ngijo gnpati akses jalan tk kecamatan tp wisatawan dtg dengan bus besar2. Hal ini menyebabkan lalu lintas terganggu. Belum lagi kemiringan jalan ke unnes yg tinggi, tidak layak untuk angkutan	Perlebar jalan k Fatimah Azahra
6/3/2022 7:27:49	Kursito	Kejaksanaan Negeri Cilacap	Kepadatan arus lalu lintas Tegal Cilacap yang semakin bertambah seiring perkembangan daerah, kemacetan di jam-jam tertentu cukup merepotkan masyarakat dan kerawanan bencana serta lakalantas.	Agar Jalan Tol Tegal Cilacap segera dibangun untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas yang saat ini sering terjadi, bukan hanya insiden tahunan arus mudik atau balik, tetapi bisa dikatakan mulai menjadi rutinitas, apalagi sering terjadi kerawanan lalu lintas baik longsor atau kecelakaan, membuat kemacetan semakin menyulitkan masyarakat. Ruas Ajibarang dan
6/3/2022 8:07:13	Hernowo Setyo Budiman	Forum DAS Bodri	1. Degradasi hutan baik hutan produksi, kawasan perlindungan dan hutan lindung di wilayah pemangkuan hutan Perhutani KPH Kedu Utara dan KPH Kendal yang berdampak pada ketersediaan air tanah. Pada hutan produksi KPH Kendal masiffnya tanaman jagung sebagai tanaman pangan yang dilakukan sepanjang tahun dengan penggunaan pestisida yang tinggi yang dapat menyebabkan tingkat kesuburan tanah berkurang, hilangnya pengikat tanah dan tanah mudah erosi berujung pada pendangkalan dasar dan muara sungai dan berakibat sungai tidak dapat menampung air hujan dengan intensitas tinggi. 2. Galian C pasir dan batu di sepanjang badan dan sepadan Kali Bodri yang	1. Perlu adanya penertiban pemanfaatan dan penggunaan lahan melalui regulasi dengan pengawasan yang ketat pada pelaksanaannya. 2. Deversifikasi tanaman pangan dibawah tegakan pohon utama. 3. Menghentikan Galian C, dengan mengalihkan mata pencaharian para pelaku dengan kepariwisataan sungai misalnya.
6/3/2022 8:44:10	Triwahyu Saifiati	Disnakerin Kota Tegal	Hal. 4-88 alinea 3 belum disebutkan sumber datanya > Berdasarkan data yang didapatkan dari "Kota Tegal".	Sebaiknya disebutkan dokumen sumber data tsb: Tegal Dalam Angka atau PDRB
6/3/2022 9:16:59	Anna Milla Rosdiana	Masyarakat	Pengaman Jalan rusak, belum diperbaiki & jalan raya pantura gelap lampu Jalan mati	Jalan arteri kaliwungu & jembatan kali bodri, segera diperbaiki, agar tidak ada kecelakaan lagi
6/3/2022 10:06:21	Cicik Setyorini, SP	DPUPR Cilacap	1. Sepanjang pantai Kabupaten Cilacap berada dalam kewenangan Hankam; 2. Tidak sepanjang kawasan sempadan pantai berupa kawasan lindung tidak terbangun, beberapa spot terdapat bangunan dengan berbagai pemanfaatan (industri, pelabuhan); 3. Pemanfaatan laut/samudera hindia sangat padat dengan lalu lintas kapal (minyak, gas, batu bara, pelabuhan umum, perikanan tangkap), demikian pula dengan pemanfaatan di bawah laut (berbagai macam pipa industri, listrik, dan air minum); dan 4. SK Kemen ATR/Ka BPN Nomor 1589 tahun 2021 tentang LSD.	1. Kesepakatan rencana peruntukan ruang laut dan darat yang ada dalam kewenangan Hankam; 2. Disesuaikan dengan eksisting untuk rencana peruntukan ruang; 3. Kesepakatan rencana peruntukan ruang laut dengan semua stakeholder terkait; 4. Sampai dengan saat ini Cilacap masih menggunakan Perda dan Perbup yang berlaku terkait ijin pemanfaatan ruang, dan proses verifikasi LSD.

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan Permasalahan	Alternatif Solusi Permasalahan
6/3/2022 11:20:10	Widjiastutik	Perorangan	di perbatikan	Permasalahan untuk limbah batik kedepan bisa terarasi
6/4/2022 7:51:43	Wasito	P3MP	Permasalahan di pesisir 1. Kawasan pesisir menjadi kawasan industri 2. Terjadi banjir rob yang masuk pemukiman 3. Terlantarnya lahan milik investor di kawasan pesisir sehingga kerusakan lahan terjadi	1. sebelum dijadikan Kawasan Industri alangkah baiknya pihak pengembang atau pemerintah membuat Greenbelt atau sabuk hijau atau kawasan hutan mangrove yang nantinya dapat menahan laju gelombang air laut serta dapat menangkap emisi dan karbon di lokasi kawasan tersebut 2. di kawasan industri pihak pengembang harus membuat reservoir atau danau sebagai penampung air baku untuk kebutuhan industri sehingga tidak menggunakan air dalam tanah Hal ini dapat memperlambat laju penurunan tanah di kawasan tersebut 3. normalisasi sungai dan anakan sungai di kawasan Muara 4. membuat sabuk pantai di kawasan terdampak banjir rob atau bencana abrasi dan konservasi mangrove 5. tanah atau lahan yang dilerantarkan oleh pihak investor dijadikan sebagai kawasan konservasi karena tanah yang sudah terkena abrasi secara otomatis menjadi tanah negara dan pemilik tidak bisa mengganggu gugat dalam hal ini Pertanahan atau pajak turun ke lokasi memastikan bahwa tanah tersebut hilang dan secara otomatis sertifikat tidak berlaku
6/4/2022 13:21:15	MUCHAMMAD MUZAKI	KI BIP	1. Efektifitas sarana dan prasarana infrastruktur Kawasan Industri yang telah dibangun perlu keseimbangan dengan optimalisasi luasan zona Kawasan Industri. 2. Kebijakan penguasaan lahan terlebih dahulu dalam pengurusan KKPR menjadi kendala dalam pemanfaatan zona Kawasan Industri setelah tidak berlakunya ijin prinsip dan ijin lokasi. 3. Banyaknya penetapan RTRW yang tidak bisa diaplikasi sesuai dengan peruntukan zonasinya karena regulasi pendukung lainnya yang membatasi,	1. Perlu kebijakan perluasan zona Kawasan Industri di sekitar Kawasan Industri yang masih satu jaringan sarana dan prasarana infrastruktur Kawasan Industri. 2. Kebijakan penguasaan lahan terlebih dahulu lebih tepatnya untuk zona Kawasan Peruntukan Industri yang harus dibedakan dengan zona Kawasan Industri yang sebaiknya diberi keleluasaan pengurusan KKPR tanpa penguasaan lahan terlebih dahulu selama masih masuk dalam zona Kawasan Industri. (seperti saat berlakunya ijin prinsip dan ijin lokasi)
6/4/2022 18:14:33	aris kurniawan	kelompok pemuda puma	alih fungsi lahan sawah padi menjadi tanaman jagung di wilayah kecamatan tersono kabupaten batang sebab berkurangnya air irigasi	1. mengurangi jumlah pipa air yg mengambil langsung dari sumber mata air 2. menjaga daerah hulu sungai 3. memperbaiki saluran irigasi
6/4/2022 21:50:39	Ade Pratama	Peternak	Melonjaknya harga pakan ternak yang tidak terjangkau	Pemerintah daerah khususnya sering meninjau kembali bahan baku
6/5/2022 10:16:02	Dian Heryani	Dputaru Rembang	1. Luasan minimal lp2b/kp2b dari Perda 2019 sulit dipenuhi daerah. 2. LSD pengendalian Atr/Bpn tidak termasuk dlm substansi RTRW kenapa mensyaratkan sinkronisasi luasan LSD dalam proses revisi RTRw kab.? Karena menghambat dan proses verifikasi Ditjen pengendalian yang tidak jelas waktunya. 3. LSD menghambat investasi daerah.	1. Updading luasan Kp2b di RTRWP, sesuai usulan kab. 2. Penyusunan RTR tidak perlu sinkronisasi luasan LSD. karena tujuannya sama mempertahankan luas lahan pangan, sudah terakomodir dalam substansi KP2B. 3. Luasan LSD otomatis yang mengikuti luasan lahan sawah dalam LP2B.
6/8/2022 7:59:08	Deviliana Sekar Kusuma Dewi, SPWK	Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Saat ini Kabupaten Sukoharjo sedang melakukan kajian review RTRW. Ada beberapa kebijakan yang saat ini belum terakomodasi dalam Perda RTRW saat ini. Beberapa kebijakan tersebut antara lain: 1. Rencana pembangunan Lapas yang merupakan pengalihan dari Lapas Solo dan akan direncanakan di Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 2. Rencana pebangunan Jalan Layang/Flyover di Kecamatan Kartasura. 3. Rencana pembangunan Jalan Lingkar Timur-Selatan Surakarta yang melewati wilayah Kabupaten Sukoharjo. 4. Rencana pembangunan terminal terpadu tipe-C sebagai titik integrasi dan interkoneksi transJateng yang berlokasi di Bekas Terminal Kartasura (utara Pasar Kartasura) dan bekas gedung film depan Pasar Sukoharjo. 5. Rencana Pembangunan SPAM Regional Wososukas tahap 1 di Kabupaten Sukoharjo dengan debit 300 L/dt di 6 Kecamatan ( Kartasura, Baki, Grogol, Mojolaban, Sukoharjo, Bendosari).	Mohon dipertimbangkan dan diakomodir dalam Revisi RTRW Provinsi Jateng.
6/8/2022 17:33:00	Naning Prih Hatiningrum	Pemkab Demak	RTRW Provinsi perlu menegaskan besaran lahan sawah yg tdk dpt dialihfungsikan, apakah menggunakan ketentuan KP2B sebagaimana tertuang dlm RTRW Prov dan kab/kota, atukah menggunakan ketentuan LSD sebagaimana diatur dalam SK Menteri ATR.	LSD sebisa mungkin sama dengan ketentuan KP2B yang sdh diakomodir dlm RTRW
6/8/2022 18:36:09	Liputan Kendal Terkini	Media Liputan Kendal Terkini	Mohon dibantu sudah 7 Tahun aliran sungai Kendal sering terjadi banjir dan rumah semi permanen yang berada di aliran sungai Kendal ditertibkan karena sangat merusak keindahan	Agar segera di normalisasi sungai Kendal, agar tidak tergenang banjir. Dan rumah semi permanen agar di tertibkan dibongkar

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan Permasalahan	Alternatif Solusi Permasalahan
6/9/2022 7:12:43	Naning Prih Hatiningrum	Pemkab Demak	Penanganan rob di Jateng khususnya yang terparah yaitu di Kec Sayung Demak sebaiknya bisa diakomodir dlm RTRW Provinsi. Hal yang perlu dikaji antara lain : penanganan penurunan muka tanah, penanganan permukiman terdampak rob, mitigasi lingkungan, arahan pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir yang mengalami penurunan muka tanah, penyikapan thd kawasan peruntukan industri pada lahan terdampak rob	-
6/9/2022 7:55:04	Dessy imawati	DPUPR temanggung	Penyelesaian Lahan Sawah Dilindungi yg tdk sesuai dg keadaan eksisting kabupaten, perkembangan kegiatan pariwisata pada kawasan resapan air, pengurangan luasan KP2B disesuaikan dengan peraturan peru dangan	Verifikasi LSD,
6/9/2022 10:02:14	Ahmad Amri Nur	ITBMP	Munculnya indutri (PT) secara sporadis dan menyebar bahkan di perkotaan Purbalingga	Perlunya disusun Masterplan Kawasan Industri dan menetapkan Kawasan Industri serta membatasi berkembangnya industri secara menyebar
6/9/2022 11:24:29	Dlyah Kartikasari	BKSDA Jawa Tengah	1. Ditetapkannya 3 Kawasan Ekosistem Esensial MAnrove di Jawa Tengah yaitu KEE Mangrove Mojo Kabupaten Pemalang, KEE Mangrove Pasarbanggi dan Tireman KABUPATEN Rembang dan KEE Mangrove Kaliijo Kabupaten Kebumen	KEE Mohon dimasukkan kedalam RTRW Prov Jateng
6/9/2022 11:27:55	Dr. Ir. Ananto Aji, MS	Jurusan Geografi UNNES	Masukan : (1) terkait keberadaan KITB yang merupakan PSN, sangat diyakini akan berdampak besar pada dinamika ruang di sekitarnya, termasuk yang menjadi kewenangan propinsi. Misal Jalan Pantura, pantai yang cukup panjang (kaitannya dengan mobilitas nelayan dan tangkapan ikan), berkembangnya golongan C tidak terkendali, dan berkembangnya area perbatasan dengan Kabupaten Kendal. Ini perlu dikaji dalam Revisi RTRWP dengan dukungan pemetaan dan data yang kuat.  Masukan : (2) Terkait dengan merebaknya Gol C di hampir seluruh wilayah kabupaten. Perijinan dan pengaturan Gol C saat ini menjadi kewenangan Propinsi. Sebagian besar Gol C bersifat illegal. Ini betul-betul butuh pengaturan serius. Revisi RTRWP harus bisa menentukan Zona Tambang yang jelas, juga tambah rakyat yang dimungkinkan. Keberadaan Gol C sudah sangat meresahkan karena menyebabkan kerusakan lingkungan.  Masukan : (3) Terkait Rob. Saat ini kejadian rob sudah melanda banyak kabupaten di Pantura, seperti Kab Tegal, Kab Pekalongan, Kota Pekalongan.	Dimasukkan dalam substansi Revisi RTRWP
6/9/2022 11:28:46	Salma Zulfa Nadhiroh	Bappeda Kabupaten Blora	1. Pertumbuhan wilayah belum merata 2. Infrastruktur belum memadai (Jalan) 3. Kerawanan bencana	1. Mengusulkan kawasan perkotaan Randublatung menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang akan ditopang oleh Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Jati, diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Wilayah Blora Selatan. 2. Mengusulkan ruas jalan Semarang-Purwodadi-Blora menjadi Jalan Nasional dan ruas jalan Randublatung-Getas-Batas Kabupaten Ngawi
6/9/2022 11:31:30	Aliya Kafabiy	Bapelitbang Batang	1. adanya pembangunan KI di Kab Batang 2. KI Batang Industrial Park yang terus berkembang ingin melebarkan kawasannya 3. kebutuhan air baku industri KITB 4. kebutuhan air minum domestik Petanglong 5. aksesibilitas KITB 6. PPI Klidang Lor yang kecil sekitar 1-2 Ha kurang memadai 7. PSN (perpres 79 dan perpres 109) di Batang harap di perhatikan	1. Kab. Batang dapat menjadi masukan dalam RTRW untuk mengurangi KPI, bertujuan agar industri dapat terpusat di KI 2. perluasan KPI di Tulis (Batang Industrial Park) dari 287 Ha menjadi 500+ Ha harap dimasukkan dalam RTRW Prov 3. Bendungan kedunglanggar 4. Waduk Spam Reg Petanglong 5. aglomerasi jalan petanglong ; trase Banyuputih - KITB 6. Pengembangan PPI Klidang Lor minimal 5 Ha
6/9/2022 11:35:49	Heru Sugiharto dan Agus Hendratno	Dinas ESDM Prov. Jateng dan UGM	Penguatan fungsi tata ruang Jawa Tengah belum sepenuhnya mempertimbangkan justifikasi lingkungan geologi dan kebencanaan geologi.	1. Perlu memasukkan aspek daya dukung lingkungan geologi 2. Perlu memasukkan aspek justifikasi kerentanan kebencanaan geologi
6/9/2022 11:36:17	Puji Prihatinningsih, ST. , M.App.Sc.	Balai Taman Nasional Karimunjawa	Pengembangan tambak di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan yang mengancam kualitas perairan dan keanekaragaman hayati di kawasan TN Karimunjawa	Sinkronisasi perencanaan kawasan darat dan pesisir sehingga jelas peruntukan masing

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan Permasalahan	Alternatif Solusi Permasalahan
6/9/2022 11:39:20	Abdur Rahman, S.Si., M.Eng., M.Eng	Bappeda Kab. Grobogan	<p>1. Terkait Struktur Ruang yang ada di kabupaten grobogan :</p> <p>a. Status Rel Kereta yang tidak aktif, dan sudah beralih fungsi menjadi alun-alun, pertokoan, hotel, dan terminal, serta jalan, Bagaimana status rel kereta yang tidak aktif ini (dimana yang di Perda 16/2019 ttg RTRW Prov, masih tergambar.</p> <p>b. Jaringan Energi, jalur atau gambar SUTET, SUTT dan lainnya sebaiknya dipastikan kembali kebenaran jalur - jalurnya.</p> <p>c. Jaringan Sumberdaya Air, jalur jaringan ini sebaiknya di cross cek ulang dengan database jaringan irigasi, dan daerah irigasi yang dimiliki pusat, provinsi, dan kabupaten.</p> <p>2. Pola Ruang dan Pengembangan Kawasan</p> <p>a. Permasalahan yang masih hangat terkait Lahan Sawah Dilindungi, sebaiknya data ini di cek kembali, kalau bisa sesuai dengan Lahan Baku Sawah yang sudah disusun oleh kementerian Pertanian dengan Dinas Pertanian di Kabupaten / kota;</p> <p>b. Arah pengembangan kawasan untuk Kabupaten Grobogan, kalau dilihat secara sekilas memang ada lack of aksesibilitas, dimana Kabupaten ini tidak</p>	<p>1. Struktur Ruang</p> <p>a. yang tidak aktif sebaiknya jangan digambarkan, namun diakomodasi di batang tubuh raperda.</p> <p>b. data harus bersumber dari instansi PLN atau instansi yang resmi</p> <p>c. data ini juga harus di cek ke masing masing kabupaten kota</p> <p>2. Pola Ruang</p> <p>a. Kembali berpedoman pada LBS bukan LSD, karena LBS ini bersumber dari interpretasi citra dan cross cek lapangan dengan kelompok tani</p> <p>b. Perlebar atau tingkatkan status jalan ke Purwodadi menjadi jalan nasional</p> <p>c. Buat KRL ke Purwodadi</p>
6/9/2022 11:41:21	AGUNG SRI AJI, SP.,MM	BAPERLITBANG	<p>kita di kab kota saat ini sangat terganggu dengan adanya penetapan LSD dari kementerian ATR/BPN walaupun sdh negosiasi ke kementerian dan juga kementerian yg sdh koordinasi ke kab/kota... tp kelihatannya keputusan penetapan LSD tetap saja. seperti yg kita ketahui bersama bahwa LSD ini ditentukan dari eksisting lahan sawah yang saat ini ada. sehingga luasan dan letak LSD tidak sesuai dengan RTRW yang sdh ditetapkan. untuk itu dari provinsi mohon ada koordinasi yang lebih intens dengan kementerian ATR/BPN terhadap permasalahan LSD ini... karena jika RTRW di kab/kota berubah</p>	<p>mengadakan rakor permasalahan LSD se kab/kota di Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian ATR/BPN. setelah fix.. baru disinkronkan dgn RTRW Provinsi</p>
6/9/2022 11:45:06	Bagas Satria Anggriawan	Bappelitbangda Kab. Demak	<p>agar Perpres 79 Tahun 2019 dimasukkan dalam Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>agar Perpres 79 Tahun 2019 dimasukkan dalam Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah</p>
6/9/2022 12:07:54	sugeng wachyono	p3ejawa klhk	<p>selain mengikuti kaidah klhs tata ruang, ada baiknya dilakukan sinkronisasi dg dokumen teknis rplhd (draf/proses perda)</p>	<p>mensinkronkan/menggunakan data d3th yang digunakan dalam penyesuaian rplhd tersebut sebagai bagian dari dasar analisis</p>
6/9/2022 12:17:00	Marlin Evalia, ST	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	<p>Banyaknya penambang ilegal di Kabupaten Banyumas akibat kesulitan mengurus ijin karena tidak sesuai peruntukan RTRW nya</p>	<p>Agar dimasukkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat untuk wilayah sungai Serayu di Kabupaten Banyumas, serta di Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang, Desa Paningkaban dan Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas</p>
6/9/2022 12:22:52	Heri Subekti, ST	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	<p>Kesulitan penambang di Kabupaten Cilacap untuk mengajukan izin karena peruntukan RTRW yang tidak sesuai khususnya tentang kesesuaian komoditas bahan tambang sebelum terbitnya Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021</p>	<p>Mohon revisi perda jateng tentang RTRW yang akan datang disesuaikan dengan perda tersebut di atas</p>
6/9/2022 12:26:41	muhammad taqiyuddin	bappeda kab. jepara	<p>pelabuhan tanjung emas yang lokasinya rawan rob dan mengalami penurunan tanah. Keberadaan pelabuhan ini strategis untuk mendorong perkembangan dan pemerataan perekonomian.</p>	<p>perlu pelabuhan skala nasional/internasional sebagai pengganti dan/atau pendukung pelabuhan tanjung emas. Salah satu lokasi terbaik untuk pembangunan pelabuhan utama ada di Kabupaten Jepara (<a href="https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-tantang-pelindo-garap-pelabuhan/">https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-tantang-pelindo-garap-pelabuhan/</a>), sehingga perlu dimasukkan dalam RTRWP. nuwun</p>
6/9/2022 12:57:39	Adang Atfan L	DPUPR Kabupaten Magelang	<p>Kekurangpaduan perencanaan dalam 1 Daerah Aliran Sungai (DAS)</p>	<p>RTRW Provinsi Megarahkan perencanaan tata ruang dalam 1 DAS</p>
6/9/2022 12:59:59	Fajar Muhammad Andhika F	Walhi Jawa Tengah	<p>1. Penataan ruang di Jawa Tengah harus melibatkan masyarakat yang terdampak dan yg berpotensi terdampak</p> <p>2. Harus memperhatikan KLHS dan menjadikan KLHS sebagai bahan pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan</p> <p>3. Perluasan kawasan tambang dan kawasan industri hanya akan memperluas kerusakan lingkungan dan memperbanyak konflik di masyarakat.</p> <p>4. Hentikan segala bentuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang mencemari laut dan udara masyarakat. Selain itu transisi energi panas bumi juga tidak bisa menjadi solusi, pada faktanya, masyarakat di Dieng terus menerus menjadi korban dengan adanya PLTPB.</p>	<p>Penetapan ruang harus melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, tidak hanya perwakilan² saja.</p>

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan Permasalahan	Alternatif Solusi Permasalahan
6/9/2022 13:02:23	HERU SUGIHARTO, ST, MT	DINAS ESDM PROV. JATENG	Dalam menyusun RTRW belum sepenuhnya memasukkan aspek Daya Dukung Geologi dan aspek Hidrogeologi.	1. Daya dukung geologi disini adalah pertimbangan terkait kondisi geologi di wilayah setempat (dapat dicermati pada Peta Geologi yang ada) seperti adanya zona patahan, formasi batuan daerah setempat, kondisi litologi/lapisan batuan penyusunnya. 2. Selain mempertimbangkan kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) yang mencerminkan potensi air tanah, juga harus memperhatikan Zona
6/9/2022 13:13:52	Muhamad Chomsul	BPBD Jawa Tengah	Sebagai upaya pengurangan risiko bencana, penataan ruang harus memperhatikan kondisi daerah rawan bencana/risiko dimasing2 kawasan di Jateng	BPBD Jateng bersama BNPB telah melakukan Kajian Risiko Bencana di Jawa Tengah. Hasil kajian bisa menjadi salah satu rujukan dalam penetapan dan penataan tata ruang di Jateng
6/9/2022 13:28:22	Indra Andrianto	Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	LSD yang ditetapkan Kementerian ATR Tahun 2021, tidak dijadikan dasar luasan oleh Provinsi dalam Revisi RTRW di pola ruangnya, saat ini beberapa Kabupaten/Kota sedang mengajukan permohonan perubahan luasan LSD termasuk Kabupaten Banjarnegara yang di LSD ditetapkan 11.696,84 ha sementara hasil identifikasi Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 luasan sawah hanya 11.400an ha, sehingga jika menggunakan luasan LSD yang ditetapkan ATR Kabupaten	Kabupaten mengajukan permohonan ke Menteri ATR dan sebagai tindak lanjut akan dilakukan verifikasi Kementerian ATR ke daerah untuk menentukan luasan yang disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan sesuai verifikasi dan validasi Kementerian ATR
6/9/2022 13:29:22	Dika Nanda Putri, S.PWK	Unissula	Banjir, rob, polusi asap kendaraan dan jalan berlubang di pantura	Pemerintah seharusnya lebih perhatian lagi dan segera menyelesaikan atau memperbaiki persoalan tersebut
6/9/2022 13:32:31	Indra Andrianto	Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	DAS Serayu menjadi prioritas penanganan dalam Gerakan Nasional Kemitraan dan Penyelamatan Air untuk pemulihan DAS, sementara Kabupaten tidak ada kewenangan kehutanan	Peran Provinsi lebih dikuatkan dalam upaya pemulihan DAS khususnya di Hulu Sungai Serayu termasuk dalam indikasi program di Revisi RTRW Prov Jateng
6/9/2022 13:36:09	Isma Hendra Saputra	Komunitas SSC Banyumas Raya	1. Urgensi Tol Pejagan - Cilacap - via percabangan Purwokerto Purbalingga, guna mendukung lancarnya arus transportasi, distribusi, Industri serta wisata kawasan. 2. Revitalisasi rel KA Purwokerto - Wonosobo ( terbentuknya poros Wisata Baturraden - Dieng dan Borrobudur)	1. Mohon Tetap masuk dalam Proyek Strategis Nasional utk tol Pejagan - Cilacap, dengan percabangan tol ke Purwokerto -Purbalingga ( Bandara Jenderal besar Soedirman) 2. Reaktivasi Rel KA Purwokerto - Wonosobo 3. Mohon Kawasan wisata Baturraden dapat menjadi KSPN, dan menjadi salah satu destinasi unggulan level Nasional di Jawa Tengah 4. Mohon dibantu untuk pembangunan double/duplikasi Jembatan Serayu Banyumas ( Kaliori - Banyumas)
6/9/2022 13:36:09	Iwan Hasan M	Bappeda	Pembagian Ruang dalam Rencana Tata Ruang pada Level Provinsi Jawa Tengah sebaiknya bukan pada pembagian wilayah mandiri tetapi harus mengakomodir RTRW Kabupaten KOTA yang sudah disusun oleh masing masing Kab/Kota. Kecuali pada Matra Laut yang secara yuridi Kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan.	Kompilasi seluruh data RTRW ( Pola Ruang dan Struktur Ruang ) dari seluruh 35 Kabupaten /Kota di Jawa Tengah untuk menjadi bahan utama dalam melakukan revisi RTRW terutama pada Kab/kota yang sudah terlebih dahulu melakukan Revisi RTRW
6/9/2022 14:34:07	Rizki	Swasta	Penggunaan ruang sepanjang jalan protokol semarang-purwodadi mohon diperhatikan, semoga menjadi prioritas karena semakin bertambah tahun semakin sangat padat sekali. Penggunaan ruang sebagai industri sepanjang jalan tersebut mohon dikontrol/dikendalikan. Dan juga badan jalan tergerus habis dengan bangunan (perdagangan jasa).	Penggunaan ruang sepanjang jalan protokol semarang-purwodadi mohon diperhatikan, semoga menjadi prioritas karena semakin bertambah tahun semakin sangat padat sekali. Penggunaan ruang sebagai industri sepanjang jalan tersebut mohon dikontrol/dikendalikan. Dan juga badan jalan tergerus habis dengan bangunan (perdagangan jasa).
6/9/2022 18:09:00	DWINTA NORI FITRIA	DPUPR KAB SUKOHARJO	Adanya rencana pembangunan jalan lingkaran timur selatan (JLTS) surakarta dari Pemerintah Kota Surakarta yang kemudian oleh kementerian PUPR disarankan menjadi jalan tol	Mengadakan pembahasan kembali dengan Kabupaten/kota yang terlewati JLTS tersebut mengenai trase jalan yang diusulkan ke Kementerian PUPR serta dampak baik buruknya apabila JLTS tersebut menjadi jalan tol.
6/9/2022 18:24:12	Oktafia Rachmawati	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang seringkali dipaksakan untuk memenuhi luasan sawah yang sudah ditetapkan dari atas, sehingga dampaknya berpotensi adanya pelanggaran tata ruang pada saat implementasi dilapangan. hal ini dikarenakan belum tersedianya data valid baik secara tabulasi maupun data spasial lahan pertanian yang produktif secara eksisting.	perlu adanya pendampingan inventarisir data lahan sawah yang benar benar produktif, tidak sekedar untuk memenuhi luasan data lahan pertanian

Timestamp	Nama Lengkap	Instansi	Masukan Permasalahan	Alternatif Solusi Permasalahan
6/10/2022 10:51:14	IQBAL ALMA GHOSAN A	WALHI JAWA TENGAH	<p>-Perda RTRW Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 ditetapkan pada 27 September 2019. Pada tahun 2022, RTRW Jawa Tengah baru berusia 3 tahun. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 23 Ayat (4) RTRW Provinsi ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Sehingga, Revisi Perda yang dilakukan sebelum lima tahun cacat formil.</p> <p>-Jika perubahan atau revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan UU Cipta Kerja seharusnya di dalam konsideran disebutkan UU Cipta Kerja sebagai bahan pertimbangan. Tetapi, hal tersebut tidak disebutkan.</p> <p>-Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan berperan dalam penataan ruang, termasuk dalam penyusunan rencana tata ruang. Pemerintah sebagai pihak yang menyusun rencana tata ruang harus memberikan akses seluas mungkin agar masyarakat bisa berpartisipasi dan mendapatkan informasi dan sosialisasi RTRW. Keberhasilan partisipasi masyarakat dari pihak pemerintah dalam perencanaan tata ruang kota dapat diukur dengan melihat banyaknya keikutsertaan masyarakat dalam proses tersebut. Sejauh mana sosialisasi yang dilakukan?</p> <p>- KLHS harus menjadi pedoman dalam penyusunan RTRW, jika UU Cipta Kerja dan PP turunannya bertentangan dengan KLHS Jawa Tengah, maka hal tersebut harus di tolak, dan sampai saat ini apakah KLHS Jawa Tengah ikut direvisi?</p> <p>- Melihat krisis air dan bencana yang terjadi di Jawa Tengah, kawasan hulu menjadi prioritas yang harus dijaga untuk jangka panjang, ini didukung oleh</p>	<p>- Pemerintah Provinsi tidak tergesa-gesa dalam melakukan revisi RTRW, pertimbangan perlindungan, pelestarian, kebencanaan dan perubahan iklim harus menjadi prioritas dalam revisi RTRW ini.</p> <p>- Pemprov harus tegas untuk berani menolak UU Cipta Kerja dan PP turunannya yang tidak sesuai dengan KLHS dan berpotensi semakin merusak kondisi lingkungan di Jawa Tengah</p> <p>- penetapan WKP Panas Bumi dan kawasan industri harus diaudit kembali</p>
6/13/2022 14:20:27	Nanik Hidayati, S.Pd.,M.Si.	Universitas Selamat Sri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya daerah/kawasan yang dibangun pada daerah rawan bencana</li> <li>2. Banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya bersahabat/kurang peduli dengan lingkungan</li> <li>3. pembangunan industri di kawasan pesisir yang sebagian besar mengambil air tanah dalam</li> <li>4. ketimpangan pembangunan di wilayah utara, tengah, dan selatan Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan pemetaan ulang kawasan dengan memperhatikan struktur geologi, hidrologi, serta kondisi lingkungan yang lain</li> <li>2. Masyarakat disadarkan dengan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, baik dengan melakukan kebersihan, penghijauan, konservasi, daur ulang limbah, serta budaya minim sampah.</li> <li>3. Perlunya kebijakan bagi industri di kawasan pesisir, agar tidak mengambil air tanah dalam (artesis) namun bisa dengan melakukan desalinasi, panen air hujan atau teknologi lain untuk mendapatkan air bersih yang bisa dikonsumsi.</li> <li>4. Meningkatkan sarana transportasi yang bisa dijangkau dari segala penjuru (daerah utara, tengah, selatan) dengan mudah dan murah. Sehingga pembangunan akan beralih di daerah tengah dengan melihat struktur geologi dan hidrologinya.</li> </ol>